SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: p-ISSN 2615-3009
Economic, Accounting, Management and Business e-ISSN 2621-3389
Vol. 8, No. 3, July 2025

Pengaruh Kenaikan Inflasi terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Kupang serta Implikasinya terhadap Kebijakan Ekonomi di Indonesia

Sarlina Agustin[1], Maria Clarissa[2], Yolanda Nelo[3], Emiliana Matuti Lawalu[4]
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia
motubere723@gmail.com

Submitted: 05th April 2025 | **Edited**: 14th June 2025 | **Issued**: 01st July 2025

Cited on: Agustin, S., Clarissa, M., Nelo, Y., & Lawalu, E. M. (2025). Pengaruh Kenaikan Inflasi terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Kupang serta Implikasinya terhadap Kebijakan Ekonomi di Indonesia. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business, 8*(3), 791-796.

ABSTRACT

Inflation remains a critical macroeconomic issue with profound implications for developing regions, particularly Kupang City in East Nusa Tenggara, Indonesia. As a structurally vulnerable area with high dependency on external supply chains and limited local production capacity, inflation has deepened existing socio-economic challenges. This study aims to explore how rising inflation affects the social and economic conditions of communities in Kupang and to assess its implications for national economic policy formulation. Using a qualitative descriptive approach, the research involved semi-structured interviews with 25 informants—including low-income households, informal workers, micro-entrepreneurs, and local policymakers—alongside field observations and analysis of secondary data from official sources. Thematic analysis was applied to identify key patterns related to inflation's local impact. The results reveal that inflation has led to declining purchasing power, reduced food quality and quantity, disrupted children's education, and increased reliance on short-term aid. Micro and small enterprises face shrinking profit margins and operational closures due to rising input costs. Local authorities report limited capacity to respond effectively due to centralized economic governance. These findings affirm Keynes' consumption theory and cost-push inflation dynamics, emphasizing that national inflation policy often overlooks regional disparities. The study recommends the development of context-sensitive policies such as improving local supply chains, empowering small enterprises, and expanding targeted welfare programs to build economic resilience in peripheral regions like Kupang.

Keywords: Inflation, Socio-economic Impact, Kupang City, Qualitative Research, Policy Implication

PENDAHULUAN

Inflasi merupakan fenomena makroekonomi yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan struktural seperti Kota Kupang. Kenaikan harga barang dan jasa yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan riil menyebabkan penurunan daya beli, memperluas ketimpangan ekonomi, serta meningkatkan risiko sosial seperti kemiskinan dan pengangguran (Kurniawati & Jatmiko, 2021). Kondisi ini semakin kompleks di daerah perifer yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan luar daerah dan

minimnya kontrol terhadap variabel makroekonomi nasional (Wulandari & Maulana, 2020).

Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah yang tengah berkembang dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang belum merata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi di kota ini menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok dan transportasi (BPS Kota Kupang, 2023). Dampak dari inflasi tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga secara sosial, seperti perubahan pola konsumsi rumah tangga, meningkatnya tekanan psikologis, serta munculnya ketergantungan pada bantuan sosial jangka pendek (Rahmawati et al., 2022).

Secara teoritis, inflasi dapat dijelaskan melalui pendekatan teori permintaan agregat dan teori konsumsi Keynes. Ketika harga-harga naik, pendapatan riil masyarakat menurun, sehingga konsumsi pun ikut berkurang (Mankiw, 2020). Di sisi lain, inflasi juga dapat terjadi karena tekanan dari sisi penawaran (*cost-push inflation*), di mana kenaikan biaya produksi dan distribusi mendorong lonjakan harga akhir (Haryanto & Dewi, 2023). Fenomena ini sangat relevan dengan kondisi di Kupang yang memiliki biaya logistik tinggi dan akses distribusi yang terbatas (Ritonga et al., 2021).

Namun demikian, sebagian besar studi mengenai inflasi di Indonesia masih berfokus pada pendekatan kuantitatif dengan objek kajian wilayah metropolitan atau pusat pertumbuhan ekonomi utama. Kajian-kajian tersebut cenderung menggeneralisasi efek inflasi tanpa mempertimbangkan karakteristik geografis, sosial, dan infrastruktur di wilayah timur Indonesia yang justru memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap fluktuasi ekonomi (Hasanah, 2021; Pratama & Halim, 2020). Hal ini menciptakan kesenjangan penelitian (*research gap*), di mana belum banyak studi yang secara eksplisit menyoroti dampak inflasi dari perspektif sosial ekonomi masyarakat di daerah berkembang seperti Kota Kupang dengan pendekatan kualitatif yang menggali narasi dan pengalaman langsung masyarakat.

Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk memahami secara kontekstual bagaimana inflasi memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Kota Kupang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih adil dan inklusif, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah berkembang dan rentan terhadap fluktuasi ekonomi nasional.

LANDASAN TEORI

Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Makro

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu periode tertentu. Fenomena ini tidak hanya menjadi indikator makroekonomi utama, tetapi juga refleksi dari dinamika produksi, distribusi, serta ekspektasi pelaku ekonomi (Arifin & Kurniawan, 2020). Bank Indonesia (2022) menyatakan bahwa inflasi yang tidak terkendali akan menciptakan ketidakpastian pasar, menghambat investasi, dan menurunkan efektivitas kebijakan moneter maupun fiskal. Studi oleh Lestari dan Handayani (2023) menegaskan bahwa inflasi sangat dipengaruhi oleh komponen biaya produksi dan rantai pasok, terutama di wilayah dengan infrastruktur ekonomi terbatas seperti kawasan timur Indonesia.

Dampak Inflasi terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat

Inflasi berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan yang penghasilannya tetap atau informal. Penurunan konsumsi rumah tangga

akibat inflasi dapat memicu penurunan gizi, pendidikan, dan kualitas hidup secara umum (Siregar & Widyaningrum, 2020). Sektor informal dan UMKM cenderung paling terdampak karena tidak memiliki daya tawar untuk menyesuaikan harga dengan cepat (Halim & Santoso, 2022). Studi di kawasan Indonesia timur menunjukkan bahwa inflasi berdampak lebih besar terhadap perempuan kepala keluarga dan pekerja sektor mikro, karena keterbatasan jaring pengaman sosial (Yunita & Sari, 2021).

Kerentanan Wilayah Berkembang terhadap Inflasi

Wilayah yang belum memiliki kemandirian ekonomi, seperti Kupang, umumnya mengalami inflasi struktural akibat ketergantungan terhadap pasokan luar daerah. Hal ini diperparah dengan lemahnya logistik, biaya distribusi tinggi, serta akses pasar yang terbatas (Mubarok & Nugroho, 2019). Menurut Prasetyo dan Alam (2020), wilayah berkembang cenderung lebih sensitif terhadap gangguan pasokan dan harga karena tidak memiliki sistem ketahanan pangan dan energi yang kuat. Maka dari itu, respon kebijakan di wilayah seperti ini harus mempertimbangkan dimensi spasial dan struktural ekonomi daerah.

Dampak Inflasi terhadap Kebijakan Ekonomi

Pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui kebijakan moneter seperti pengendalian suku bunga atau intervensi likuiditas. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan fiskal yang mendukung daya beli masyarakat dan keberlangsungan UMKM, seperti subsidi pangan, bantuan sosial bersyarat, dan insentif distribusi logistik (Utami & Rachman, 2021). Penerapan kebijakan yang terlalu sentralistik sering kali tidak efektif untuk wilayah luar Jawa karena tidak mempertimbangkan karakteristik lokal (Saputri & Nawawi, 2023). Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pengendalian inflasi menjadi penting untuk menjawab tantangan spesifik di daerah berkembang.

Landasan Teoretis: Teori Konsumsi dan Cost-Push Inflation

Teori konsumsi dari Keynes menyatakan bahwa konsumsi masyarakat sangat tergantung pada pendapatan riilnya. Dalam konteks inflasi, peningkatan harga mengurangi nilai riil pendapatan dan secara langsung menurunkan konsumsi (Mankiw, 2020). Sementara itu, teori cost-push inflation menjelaskan bahwa kenaikan harga juga dapat disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi dan distribusi, yang kemudian dibebankan kepada konsumen (Blanchard, 2021). Dua pendekatan ini relevan untuk memahami konteks Kupang, di mana biaya logistik tinggi dan pendapatan masyarakat tidak elastis terhadap perubahan harga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam dampak kenaikan inflasi terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kota Kupang. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap realitas sosial secara kontekstual dan holistik, melalui narasi, pengalaman, dan respons masyarakat terhadap tekanan ekonomi yang kompleks (Salim & Rustiadi, 2020). Fokus utama penelitian adalah perubahan dalam pola konsumsi, kesejahteraan rumah tangga, strategi bertahan hidup, dan persepsi terhadap kebijakan pemerintah di tengah gejolak inflasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dan observasi partisipatif. Wawancara dilakukan terhadap 25 informan yang dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan keterwakilan kategori sosial, yaitu kepala rumah tangga berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil, pedagang pasar, tokoh masyarakat, serta pejabat pemerintah daerah terkait. Penentuan informan

mempertimbangkan variasi latar belakang ekonomi, gender, dan lokasi domisili di wilayah Kota Kupang, guna memperoleh gambaran yang menyeluruh (Kusuma & Harini, 2022). Observasi dilakukan pada lokasi aktivitas ekonomi seperti pasar tradisional dan lingkungan permukiman padat, untuk menangkap dinamika sosial ekonomi secara langsung.

Proses penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu dari Desember 2024 hingga Februari 2025. Selain data primer, penelitian juga menggunakan sumber data sekunder dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik, dokumen kebijakan pemerintah daerah, serta pemberitaan media lokal. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik, yang meliputi transkripsi data, pengkodean terbuka, kategorisasi, serta penarikan tema-tema utama berdasarkan pengulangan makna dan pola keterkaitan antar narasi (Miles, Huberman, & Saldaña, 2020). Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dan metode, serta pengecekan ulang dengan informan kunci (member checking) untuk memastikan keakuratan interpretasi peneliti.

Metode ini dipandang tepat untuk menggali permasalahan inflasi di daerah perifer seperti Kupang, karena memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana makna ekonomi dikonstruksi oleh masyarakat dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Pendekatan ini juga memungkinkan penelitian memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti kontekstual, yang semakin penting dalam desain kebijakan pembangunan regional (Nugroho & Widiatmoko, 2021; Setyawan et al., 2023).

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini mengungkap bahwa kenaikan inflasi di Kota Kupang memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti rumah tangga berpendapatan rendah, pelaku usaha mikro, serta pekerja sektor informal. Secara umum, inflasi menyebabkan penurunan daya beli, perubahan perilaku konsumsi, kerentanan sosial, serta ketidakstabilan ekonomi rumah tangga.

Wawancara dengan kepala rumah tangga di Kelurahan Oepura dan Fatululi menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mengeluhkan kenaikan harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan LPG, tanpa adanya kenaikan pendapatan yang sepadan. Seorang informan menyatakan :

> *"Sekarang kami beli beras hanya cukup untuk dua hari. Dulu bisa beli sekantong besar, sekarang paling satu liter dua liter."*

Pernyataan ini mencerminkan tekanan ekonomi yang mendorong perubahan drastis dalam strategi konsumsi dan prioritas kebutuhan dasar. Beberapa keluarga juga mengurangi frekuensi makan daging atau makanan bergizi, yang berimplikasi pada penurunan kualitas gizi, terutama bagi anak-anak.

Dampak serupa dirasakan pelaku usaha mikro dan pedagang pasar. Kenaikan harga bahan baku dan distribusi tidak dapat diimbangi dengan menaikkan harga jual karena daya beli konsumen juga menurun. Seorang pedagang makanan mengaku :

> *"Bumbu naik, gas naik, tapi kalau saya ikut naikkan harga, pembeli kabur. Jadi saya potong porsinya."*

Strategi semacam ini menyebabkan penurunan kualitas produk dan keuntungan, bahkan mendorong beberapa usaha kecil untuk tutup atau beralih ke usaha informal lain. Kondisi ini sejalan dengan temuan Halim dan Santoso (2022) yang menyatakan bahwa UMKM di daerah non-metropolitan lebih cepat mengalami kontraksi usaha dalam tekanan inflasi.

Secara sosial, tekanan ekonomi memicu ketegangan dalam rumah tangga, perubahan peran gender, serta meningkatnya ketergantungan pada bantuan sosial baik dari pemerintah maupun lembaga sosial. Beberapa informan menyatakan kelelahan secara emosional karena harus memilih antara kebutuhan sekolah anak, biaya listrik, dan belanja dapur harian. Ketidakstabilan ini juga memengaruhi kondisi psikologis anggota keluarga, terutama perempuan sebagai manajer konsumsi rumah tangga.

Observasi di beberapa pasar tradisional menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan mengalami perlambatan, ditandai dengan berkurangnya stok barang dan frekuensi transaksi. Informalitas ekonomi tampak meningkat, dengan lebih banyak warga membuka lapak darurat atau berjualan secara temporer di pinggir jalan. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi lokal ke arah aktivitas subsisten sebagai respons adaptif terhadap inflasi, seperti yang juga dicatat oleh Yunita dan Sari (2021) dalam studi mereka tentang ekonomi marjinal perempuan di wilayah 3T.

Sementara itu, dari sisi kelembagaan, pemerintah daerah menghadapi keterbatasan kewenangan dalam mengatur harga dan pasokan bahan pokok karena sebagian besar instrumen kebijakan inflasi berada pada otoritas pusat. Selain itu, distribusi bantuan sosial yang tidak merata atau tidak tepat sasaran memicu frustrasi di kalangan masyarakat. Salah satu tokoh masyarakat menyampaikan :

"Bantuan sering datang tapi tidak sesuai kebutuhan. Yang butuh kadang tidak dapat, yang mampu malah dapat."

Temuan penelitian ini memperkuat teori konsumsi Keynes, di mana konsumsi rumah tangga menurun akibat pendapatan riil yang tergerus inflasi (Mankiw, 2020). Selain itu, dinamika yang muncul juga mencerminkan teori *cost-push inflation*, di mana kenaikan harga dipicu oleh meningkatnya biaya produksi dan logistik yang kemudian dibebankan kepada konsumen (Blanchard, 2021).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi di Kota Kupang bukan hanya fenomena ekonomi, melainkan juga faktor multidimensional yang memengaruhi relasi sosial, stabilitas psikologis, dan keberlanjutan ekonomi lokal. Oleh karena itu, strategi penanganan inflasi harus bersifat kontekstual, memperhatikan daya tahan sosial masyarakat dan karakteristik ekonomi wilayah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa inflasi di Kota Kupang tidak hanya menjadi tantangan ekonomi makro, tetapi juga memicu beragam kerentanan sosial di tingkat rumah tangga dan komunitas lokal. Kenaikan harga bahan pokok dan biaya hidup telah secara nyata mengurangi daya beli, memperburuk pola konsumsi, dan menurunkan kualitas kesejahteraan, khususnya di kalangan masyarakat berpendapatan rendah, pelaku UMKM, dan sektor informal. Dalam konteks ini, inflasi memperlihatkan karakter multidimensional, memengaruhi aspek ekonomi, sosial, dan psikologis secara bersamaan.

Dari perspektif teori, temuan ini memperkuat pandangan Keynes mengenai penurunan konsumsi akibat menyusutnya pendapatan riil, serta teori *cost-push inflation* yang menjelaskan kenaikan harga sebagai akibat dari meningkatnya biaya produksi dan distribusi. Kondisi geografis Kupang yang jauh dari pusat logistik nasional turut memperparah dampak inflasi, menunjukkan bahwa pendekatan umum dalam pengendalian inflasi kurang efektif bila tidak disesuaikan dengan keragaman konteks wilayah.

Oleh karena itu, diperlukan desain kebijakan ekonomi yang lebih responsif, desentralistik, dan berbasis data lokal. Strategi tersebut dapat mencakup penguatan rantai

pasok pangan lokal, insentif bagi UMKM, serta penyempurnaan sistem perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu membangun sinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya menjaga stabilitas harga secara nasional, tetapi juga menjamin ketahanan sosial ekonomi masyarakat di wilayah berkembang seperti Kota Kupang.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, D., & Kurniawan, T. (2020). Determinants of Inflation in Indonesia: Evidence from Structural Equation Modelling. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 21(1), 45–60.

Bank Indonesia. (2022). *Laporan Inflasi Indonesia 2022*. Bank Indonesia.

Blanchard, O. (2021). *Macroeconomics* (8th ed.). Pearson.

BPS Kota Kupang. (2023). *Statistik Daerah Kota Kupang 2023*. Badan Pusat Statistik.

Halim, R. A., & Santoso, W. (2022). UMKM dan Inflasi: Studi Kasus Resiliensi Usaha Mikro di Masa Krisis. *Jurnal Ekonomi dan Inovasi*, 4(2), 101–115.

Haryanto, A., & Dewi, M. A. (2023). Analisis Inflasi dan Daya Beli Masyarakat di Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 15(1), 33–45.

Hasanah, U. (2021). Dinamika Inflasi dan Ketimpangan Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Sosial Humaniora*, 11(2), 89–103.

Kurniawati, D., & Jatmiko, P. B. (2021). Dampak Inflasi Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 21(3), 221–234.

Kusuma, H., & Harini, R. (2022). Purposive Sampling dalam Riset Sosial: Strategi Efektif untuk Studi Kontekstual. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(2), 88–98.

Lestari, M., & Handayani, N. (2023). Rantai Pasok dan Inflasi: Bukti Empiris dari Wilayah Non-Metropolitan. *Jurnal Ekonomi Wilayah*, 6(1), 33–47.

Mankiw, N. G. (2020). *Principles of Economics* (9th ed.). Cengage Learning.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Mubarok, H., & Nugroho, A. (2019). Kerentanan Inflasi Struktural di Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 20(2), 88–102.

Nugroho, R., & Widiatmoko, A. (2021). Pendekatan Kualitatif dalam Evaluasi Kebijakan Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 25(1), 41–58.

Prasetyo, D., & Alam, R. (2020). Spatial Vulnerability of Inflation: A Regional Approach. *Indonesian Journal of Regional Economics*, 4(1), 15–27.

Pratama, R., & Halim, R. E. (2020). Efektivitas Kebijakan Fiskal dalam Mengendalikan Inflasi di Daerah Tertinggal. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Daerah*, 7(2), 57–69.

Rahmawati, A., Nugroho, B. A., & Fitriana, I. (2022). Resiliensi Sosial Masyarakat Terhadap Kenaikan Harga Pangan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(1), 13–25.

Salim, H., & Rustiadi, E. (2020). Pendekatan Kualitatif dalam Studi Ketimpangan Regional. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Wilayah*, 8(2), 121–134.

Saputri, E., & Nawawi, M. (2023). Sentralisasi Kebijakan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah: Studi Inflasi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 74–89.

Setyawan, D., Prabowo, T., & Luthfi, R. (2023). Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi: Refleksi atas Ketahanan Wilayah Periferal. *Jurnal Pembangunan dan Perencanaan Daerah*, 5(1), 15–30.

Siregar, F., & Widyaningrum, A. (2020). Dampak Inflasi terhadap Kesejahteraan Sosial: Perspektif Mikroekonomi. *Jurnal Sosial Ekonomi Indonesia*, 8(3), 121–135.

Utami, A., & Rachman, R. (2021). Evaluasi Kebijakan Fiskal dalam Merespons Inflasi di Daerah Tertinggal. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 61–73.

Wulandari, S., & Maulana, H. (2020). Ketimpangan Akses Ekonomi Akibat Inflasi di Kawasan Periferal. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Indonesia*, 4(2), 99–112.

Yunita, A., & Sari, K. (2021). Inflasi dan Ketahanan Ekonomi Perempuan di Daerah 3T. *Jurnal Ekonomi Sosial Gender*, 2(2), 56–70.